

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (R. Persada (ed.); Ed.1).
- Ari Iswahyuni. (2018). *KEDUDUKAN ANCAMAN PIDANA MINIMAL DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PASCA DIKELUARKANNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015*. 3(1), 19–32.
- Askarial. (2018). Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(79), 22.
- Astim Riyanto. (2009). *Teori Konstitusi*.
- Aswan. (2019). *SENI BELAJAR HUKUM (Suatu Pengantar Ilmu Hukum)* (Guepedia (ed.)).
- Gialdah, T. B., & Hulukati, T. S. (2020). *DASAR DASAR HUKUM PIDANA* (Ed.1).
- Inggiz, R. T., Kushartono, T., & Amanita, A. (2019). Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 1(1), 1–29.
- Ismail, N. (2006). *PERKEMBANGAN HUKUM PERTANAHAN Pendekatan Ekonomi Politik*.
- Marzuki, S., Jayus, J. A., Wijayanto, D., & Roejito. (2014). *DISPARITAS PUTUSAN HAKIM “Identifikasi dan Implikasi.”*
- Mukhtar, E. (2008). *IMPLEMENTASI TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PERKARA PSIKOTROPIKA OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA*.

- Pratama, Y., Sanyoto, S., & Yuris, D. P. (2020). PENJATUHAN PIDANA PENJARA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 220/Pid *Soedirman Law Review*.
- Pusat Penelitian, Data, dan I. B. N. N. 2022. (n.d.). *INDONESIA DRUGS REPORT 2022*.
- Renggong, R. (2015). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*.
- Ridwan Hr. (2018). *Hukum Administrasi Negara* (Ed. Revisi).
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas Program P4Gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, 10*(2), 153.
- Silfy Maidianti. (2023). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. *Journal of Social and Economics Research, 4*(2), 191–197. <https://doi.org/10.54783/jsr.v4i2.56>
- Wahyuni, F. (2017). *DASAR - DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA* (M. R. Azmi (ed.); Ed.1).

Peraturan Perundang – undangan

- Kitab Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polisi dan Komisi Kode

Etik Polisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian.

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn Di Pengadilan Negeri Majene.

SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang - Undang No. 48 Thn 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP.